

**PERAN PEREMPUAN SUKU MINANGKABAU YANG MENJADI KEPALA KELUARGA (PEKKA) BAGI PENCIPTAAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PADANG TIMUR**

**Siska Sasmita**

Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS)  
Universitas Negeri Padang

**Abstract**

*Segment of the third world's poorest people live in households headed by women, because in these households there is no man who can give income. When female heads of families are in a poor position then their ability to meet food needs for family members bear is also questionable. For the case of West Sumatra, although women are culturally Minangkabau tribe, has a fairly dominant position in the division of inheritance, which means has the advantage economically, but not necessarily female heads of families in West Sumatera is able to create and maintain a stable food security for the household, especially if fosterage family not just the nuclear family only. The power and intervention of 'mamak' is very strong in the decision making of high inheritance. This phenomenon indicates that the Minangkabau women actually do not have control over resources, such as land and other high inheritance. Moving on from the facts presented above writer is interested to dig further in research on women's roles Minangkabau tribe who became head of the family for the creation of household food security, with the focus of study in the Eastern District of Padang.*

**Kata kunci:** perempuan kepala keluarga, ketahanan pangan rumah tangga

**Pendahuluan**

Akibat krisis moneter berkelanjutan perekonomian Indonesia mengalami pukulan telak. Melonjaknya angka pengangguran dan inflasi yang relatif tinggi membuat biaya hidup meningkat drastis. Perempuan yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka semakin tidak berdaya ketika sulitnya mendapatkan sarana dan kesempatan yang setara untuk hidup layak. Kondisi demikian kemudian meminggirkan hak sosial dan ekonomi perempuan-perempuan tersebut.

Segmen masyarakat termiskin di dunia ketiga hidup dalam rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, karena di dalam rumah tangga tersebut tidak ada laki-laki yang dapat memberi nafkah. Fakta terkini menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perempuan dan remaja perempuan di dunia hanya di bawah 1%. Dari keseluruhan jumlah orang miskin di dunia, 84% nya adalah perempuan, dan banyak

diantara mereka adalah anggota keluarga yang kepala keluarganya perempuan. Jahan dalam F.Porter dan C.Sweetman mengemukakan contoh bahwa salah satu penyebab kemiskinan perempuan kepala keluarga (perempuan janda, yang harus menghidupi diri dan anaknya sendiri) di Afrika adalah ketiadaan akses dan hak kepemilikan atas tanah. Seorang perempuan yang ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau yang menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin akan lebih miskin dibandingkan laki-laki dari kategori yang sama. Karena potensi perempuan dalam membuat pendapatan sendiri jauh lebih rendah daripada yang dimiliki kaum lelaki, maka perempuan dan keluarga yang diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin.

Pada umumnya perempuan yang ada dalam rumah tangga yang juga dikepalai perempuan mempunyai tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, serta fertilitas yang

tinggi. Disamping beban berat yang harus ditanggung para perempuan tersebut karena menjadi orangtua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pembelanjaan pangan perkapita. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan laki-laki. Dengan demikian semakin kecil penghasilan perempuan, maka semakin besar kemungkinan anak-anak menderita gizi buruk.

Beban psikologis yang ditanggung perempuan kepala keluarga karena harus menghidupi keluarga yang diasuhnya seorang diri seringkali diperparah oleh cara pandang masyarakat yang cenderung patriarkis. Dalam konteks budaya masyarakat Indonesia yang dikuatkan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang ditetapkan sebagai kepala keluarga adalah laki-laki. Akibatnya, perempuan kepala keluarga tidak mendapat pengakuan hukum maupun budaya. Perempuan yang menjadi kepala keluarga dianggap tidak akan mampu menjalankan fungsi kepala keluarga secara baik dan utuh. Asumsinya perempuan kepala keluarga tidak akan mampu memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara layak karena akses mereka terhadap perekonomian menjadi terbatas.

Ketika perempuan kepala keluarga berada dalam posisi miskin maka kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga yang ditanggungnya juga dipertanyakan. Hal ini tentu saja akan berimplikasi lebih lanjut terhadap ketahanan pangan keluarga yang diasuhnya. Ketahanan pangan berarti kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, maupun mutunya, aman, serta merata terjangkau. Ketahanan pangan harus sepenuhnya tertumpu pada sumber pangan lokal, mengandung keragaman antar daerah, dan tidak tergantung pada pemasukan pangan dari luar negeri.

Dalam hal tidak terpenuhinya hak atas pangan yang layak, perempuan dan anak perempuan adalah juga kelompok yang paling menderita. Dalam kondisi pangan tersedia dan dapat diperoleh sekalipun, belum tentu perempuan dapat menggunakannya. Data FAO

menunjukkan bahwa di banyak negara, anak perempuan dua kali lebih banyak dibandingkan anak laki-laki yang meninggal. Penyebabnya adalah kurang gizi dan penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Demikian pula pada perempuan dewasa ditemukan jumlah yang menderita malnutrisi dua kali lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Melihat fenomena demikian tidak salah jika banyak ahli yang mengkhawatirkan terjadinya *lost generation* di Indonesia. Koran Tempo bahkan dengan cermat memprediksikan ancaman *lost generation* akibat kurang gizi, gizi buruk, busung lapar, dan kelaparan dalam berbagai manifestasinya. Disebutkan, berdasarkan data 2003; 27,5% dari 18 juta anak di bawah lima tahun di Indonesia kekurangan gizi dan empat juta ibu hamil menderita anemia gizi. Yang membuat miris, semua provinsi tidak ada yang luput dari kasus kekurangan gizi. Masalah gizi sering kali dilihat sebagai masalah kemiskinan dan soal pangan. Jika dikaitkan dengan wacana sebelumnya, maka keluarga yang dikepalai oleh perempuan merupakan keluarga yang paling rentan terhadap masalah pangan. Kondisi ekonomi yang miskin menyebabkan perempuan kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya secara memadai. Bila kita gunakan perhitungan statistik maka potensi *lost generation* di Indonesia cukup besar karena perhitungan terkini menunjukkan enam juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan, dengan rata-rata pendapatan Rp 10.000,- per hari. Untuk kasus Sumatera Barat saja ada 100.994 kepala keluarga perempuan yang menurut data BPS adalah jumlah terbesar perempuan yang menjadi kepala keluarga secara nasional.

Walaupun secara kultural perempuan di Sumatera Barat, utamanya perempuan suku Minangkabau, memiliki posisi cukup dominan dalam pembagian harta pusaka yang berarti memiliki keuntungan secara ekonomis, namun tidak serta merta perempuan kepala keluarga di Sumatera Barat mampu menciptakan dan menjaga kestabilan ketahanan pangan bagi rumah tangganya, apalagi jika keluarga yang diasuhnya bukan hanya keluarga inti saja. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Padang tahun 2003 yang menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau meskipun

## *Peran Perempuan Suku Minangkabau...*

menganut sistem matrilineal, sistem kekuasaannya tidaklah matriarkal. Kekuasaan formal, baik secara tradisional maupun modern, tetap dipegang oleh laki-laki. Hukum adat Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pewaris dan pemilik sah pusaka. Namun, hampir di semua wilayah Sumbar terdapat kasus di mana mamak (saudara laki-laki dari pihak ibu) mendominasi dan mengambil alih beberapa kewenangan strategis yang secara ideal normatif menjadi hak perempuan. Hak kepemilikan pusaka yang secara sah berada di bawah kekuasaan perempuan sering kali tidak berlaku efektif. Kekuasaan dan intervensi mamak sangat kuat dalam pengambilan keputusan terhadap harta pusaka tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau sesungguhnya tidak memiliki kontrol terhadap sumber daya, seperti tanah dan harta pusaka tinggi lainnya. Beranjak dari fakta-fakta yang tersaji di atas penulis tertarik untuk menggali-nya lebih lanjut dalam penelitian tentang peran perempuan suku Minangkabau yang menjadi kepala keluarga bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga. Namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya maka penelitian ini hanya akan difokuskan pada lingkup kecamatan Padang Timur.

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana peran perempuan suku Minangkabau yang menjadi kepala keluarga bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Padang Timur.
2. Upaya-upaya apa yang ditempuh perempuan suku Minangkabau yang menjadi kepala keluarga (Pekka) untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga yang diasuhkannya.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Perempuan Kepala Keluarga***

Istilah perempuan kepala keluarga (PEKKA) mungkin belum menjadi istilah umum di Indonesia karena dalam budaya maupun pengertian di berbagai agama, kepala keluarga adalah laki-laki. Namun dalam kenyataan, perempuan kepala keluarga jumlahnya tidak sedikit. Di Indonesia, menurut PEKKA (organisasi yang menangani perempuan kepala keluarga), diperkirakan ada lebih 6 juta perem-

puan kepala keluarga, yang tiap orang rata-rata menghidupi 3-5 anggota keluarga. Mereka kebanyakan bekerja di sektor informal dan berpenghasilan sekitar Rp 10.000/hari.

Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah para janda yang ditinggal mati suami karena konflik atau meninggal karena sakit. Secara kultural di Indonesia, biasanya para istri yang ditinggal mati suaminya sering tidak berumah tangga lagi dan bertahan hidup sendiri untuk membiayai anggota keluarga. Sementara kebalikannya, suami yang ditinggal mati istri dan bertahan hidup sendiri jumlahnya tidak banyak. Di samping para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala keluarga adalah para istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah. Secara legal, status mereka masih menjadi istri, namun, secara ekonomi, karena kemiskinan, mereka harus menjadi kepala keluarga karena penghasilan suami tidak cukup untuk dikirimkan ke keluarga dan habis untuk mereka pakai sendiri di kota, sehingga perempuan menjadi penanggung jawab penuh kegiatan dan kebutuhan hidup sehari-hari di desa atau di kampung. Tipe lain perempuan kepala keluarga, adalah para perempuan yang menjadi korban poligami. Menurut studi dan data Komnas Perempuan, seringkali kasus poligami mendorong perempuan menjadi kepala keluarga dan mengalami kekerasan baik secara psikologis dan ekonomis. Hal ini terjadi karena pada umumnya perempuan memilih untuk diam dan tidak dinafkahi, ataupun harus berpindah tempat tanpa bercerai sehingga mereka harus menghidupi keluarganya.

Estimasi enam juta perempuan kepala keluarga di atas akan menjadi besar apabila istilah kepala keluarga diterjemahkan menjadi; pencari nafkah utama dan karena jumlah tersebut belum ditambah jutaan TKW, baik yang menikah atau yang belum, yang bekerja di luar negeri dan menjadi tulang punggung keluarga. Ada banyak kejadian ketika mereka bekerja di luar negeri, uang kiriman yang diberikan ke keluarga dipakai kawin lagi oleh para suami mereka. Banyak yang kemudian statusnya tidak jelas, sementara mereka masih menghidupi keluarga termasuk keluarga suami mereka. Jumlah riil menjadi sulit karena perempuan kepala keluarga dalam statistik sering tidak muncul mengikuti kategori di atas.

Saat bencana dan kejadian luar biasa, perempuan kepala keluarga sering tidak dikenal, karena istilah dan terminologi kepala keluarga yang dikenal hanya laki-laki, sehingga sering mereka tidak mendapat bantuan. Beberapa masalah yang sering dihadapi perempuan keluarga di antaranya adalah, perempuan kepala keluarga biasanya sulit memiliki akses terhadap kredit karena banyak aturan di perbankan yang mengharuskan kredit disetujui suami atau pasangan hidupnya. Hanya koperasi dan arisan yang jumlahnya kecil yang mungkin bisa mereka akses. Secara sosial mereka kemudian jarang dilibatkan dalam pertemuan apabila sudah berpredikat janda atau menjadi kepala keluarga.

Mengacu pada kondisi riil di lapangan, peneliti menambahkan satu kategori perempuan kepala keluarga lagi yaitu perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Pada dasarnya mereka masih memiliki suami yang tinggal satu atap namun suami tidak berkontribusi menciptakan penghasilan bagi keluarga. Dengan kata lain tanggungjawab mencari nafkah berada di tangan perempuan.

### ***Konsep Ketahanan Pangan Rumah Tangga***

Ketahanan Pangan Rumah Tangga sebagaimana hasil rumusan *International Congress of Nutrition* (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam sidang Committee on World Food Security 1995 definisi tersebut diperluas dengan menambah persyaratan "Harus diterima oleh budaya setempat (*acceptable with given culture*)". Hal lain dinyatakan Hasan (1995) bahwa ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga antara lain tercermin oleh tersedianya pangan yang cukup dan merata pada setiap waktu dan terjangkau oleh masyarakat baik fisik maupun ekonomi serta tercapainya konsumsi pangan yang beraneka ragam, yang memenuhi syarat-syarat gizi yang diterima budaya setempat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Sehubungan dengan itu untuk mewujudkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga diperlukan kelembagaan pangan karena ketahanan pangan mempunyai cakupan luas dan bersifat multisektoral meliputi aspek peraturan perundangan, organisasi sebagai pelaksana peraturan perundangan dan ketatalaksanaan (Soetrisno, 1996).

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu:

1. Kecukupan ketersediaan pangan;  
Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan kebiasaan makan penduduk di daerah tersebut.

Penggunaan frekuensi makan sebanyak tiga kali atau lebih sebagai indikator kecukupan makan didasarkan pada kondisi nyata di desa-desa (berdasarkan penelitian PPK-LIPI), dimana rumah tangga yang memiliki persediaan makanan pokok 'cukup' pada umumnya makan sebanyak tiga kali per hari. Jika mayoritas rumah tangga di satu desa, misalnya, hanya makan dua kali per hari, kondisi ini semata-mata merupakan suatu strategi rumah tangga agar persediaan makanan pokok mereka tidak segera habis, karena dengan frekuensi makan tiga kali sehari, kebanyakan rumah tangga tidak bisa bertahan untuk tetap memiliki persediaan makanan pokok hingga panen berikutnya.

3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan (misal sawah untuk provinsi Lampung dan ladang untuk provinsi NTT) serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:

- Akses langsung (*direct access*), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang
- Akses tidak langsung (*indirect access*) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang.

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu: (1) produksi sendiri, dan (2) membeli. Indikator aksesibilitas atau keterjangkauan rumah tangga terhadap pangan dikelompokkan dalam kategori seperti pada tabel berikut:

Dari pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian diukur indikator stabilitas ketersediaan pangan yang merupakan penggabungan dari stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan ini menunjukkan suatu rumah tangga apakah:

- Mempunyai persediaan pangan cukup
  - Konsumsi rumah tangga normal dan
  - Mempunyai akses langsung terhadap pangan
4. Kualitas/keamanan pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi gizi

Ukuran kualitas pangan seperti ini biasanya hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/atau nabati.

Ukuran kualitas pangan ini tidak mempertimbangkan jenis makanan pokok. Alasan yang mendasari adalah karena kandungan energi dan karbohidrat antara beras, jagung dan ubi kayu/tiwul sebagai makanan pokok di desa-desa penelitian

tidak berbeda secara signifikan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena luasnya kajian dalam penelitian kualitatif maka metode yang sesuai untuk mengakomodasi permasalahan yang telah dikemukakan di depan adalah menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Dengan demikian, penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan ini akan membantu peneliti menganalisis peran perempuan suku Minangkabau yang menjadi kepala keluarga (Pekka) bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga.

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel perempuan kepala keluarga dari tiga kelurahan di Kecamatan Padang Timur, yaitu Kelurahan Simpang Haru, kelurahan Sawahan, dan kelurahan Ganting Parak Gadang. Dengan proporsi 50:30:20, peneliti memilih informan perempuan kepala keluarga dari kelompok keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, dan keluarga sejahtera II. Adapun kategori perempuan kepala keluarga yang menjadi informan adalah para janda yang ditinggal mati suami, perempuan yang menjadi korban poligami, dan perempuan yang pencari nafkah utama keluarga.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Peran perempuan suku Minangkabau yang menjadi Kepala Keluarga (Pekka) di Kecamatan Padang Timur bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga***

Dalam beberapa tahun terakhir ada indikasi peningkatan jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan di Kecamatan Padang Timur, khususnya untuk kelurahan-kelurahan yang menjadi objek penelitian. Salah satu faktor penyebabnya diperkirakan karena mulai banyak keluarga yang menjadikan perempuan (ibu) sebagai aktor ekonomi dominan. Hal ini tidak hanya disebabkan karena ketiadaan bapak sebagai kepala keluarga yang boleh jadi sudah meninggal dunia atau memang bercerai dengan sang istri, namun karena banyaknya istri yang bekerja dan kemudian menggantikan peran suami dalam mencari nafkah bagi keluarga.

Dalam hal perempuan sebagai aktor ekonomi dominan dalam keluarga dan menggantikan peran lelaki yang tak mampu mem-

nuhi nafkah keluarga, perempuan tetap saja berada dalam posisi subordinasi. Walaupun perempuan mampu memperoleh imbalan finansial dari kegiatan produktif yang dilakukannya tetap saja lelaki yang kemudian memiliki wewenang menentukan keputusan untuk menggunakan pendapatan keluarga yang diperoleh perempuan. Dalam banyak kasus porsi terbesar dari pendapatan tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi lelaki yang cenderung konsumtif seperti untuk membeli rokok, bermain judi, atau sekedar untuk difoya-foyan di kedai kopi. Sisa dari bagian pendapatan yang telah digunakan oleh lelaki itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak-anak.

Di satu sisi mungkin saja perempuan bisa menyimpan sedikit penghasilan yang diperolehnya sebagai cadangan dana yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak. Tapi di sisi lain, lelaki yang tidak memperoleh bagian dari penghasilan yang diperoleh perempuan cenderung dengan cara sembunyi-sembunyi mengambil dan menggunakan uang tersebut. Pada beberapa rumah tangga, hal ini terkadang disertai dengan pemaksaan yang kemudian berujung pada kekerasan fisik dan psikis. Sekali lagi disini perempuan berada dalam posisi lemah karena tidak berdaya melawan kuasa lelaki yang secara atributif masih dipandang sebagai kepala keluarga.

Ada juga lelaki yang menganggap perempuan sebagai kekayaan. Lelaki percaya bahwa mereka memiliki wewenang untuk mengontrol perempuan sebagai bawahannya. Perempuan dianiaya secara fisik dan psikis karena ketidakmampuan dan penolakan mereka untuk melakukan kerja ekstra demi menambah penghasilan keluarga.

Mayoritas perempuan yang menjadi tumpuan keluarga bekerja di sektor informal, seperti berdagang, menjadi buruh cuci, atau pembantu rumah tangga dengan pendapatan maksimal berkisar Rp.500.000 setiap bulannya. Dari penghasilan yang relatif kecil tersebut, para perempuan ini berupaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang diasuhnya. Dari jawaban angket dan wawancara yang dilakukan terhadap responden diperoleh gambaran mengenai kondisi ketahanan pangan keluarga yang dikepalai oleh perempuan kepala keluarga.

Ada empat komponen yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga, berikut penjelasannya berdasarkan jawaban responden:

1. Kecukupan ketersediaan pangan

Semua responden dalam penelitian ini mengkonsumsi nasi sebagai bahan makanan pokok. Disamping karena kebiasaan turun-temurun, hal ini juga dikarenakan adanya anggapan jika belum mengkonsumsi nasi maka belum dianggap 'makan.' Makanan pokok dari jenis lain seperti jagung atau ketela hanya dianggap sebagai makanan selingan. Seberapa kecilpun penghasilan yang diperoleh para perempuan tersebut mereka tetap berusaha agar keluarganya bisa menikmati nasi sebagai makanan pokok. Namun acapkali makanan pokok tersebut hanya tersedia untuk konsumsi satu hari atau untuk tiga kali makan. Dengan kata lain mereka tidak lagi memiliki persediaan untuk esok hari, dan harus mengusahakannya kembali. Hal ini sejalan dengan pengakuan 30 persen responden bahwa penghasilan yang diperoleh hanya bisa digunakan untuk konsumsi hari ini.

2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun

Dalam rumah tangga yang dikepalai para perempuan ini frekuensi makan sehari maksimal dua kali, yaitu makan siang dan makan malam. Sarapan pagi menjadi tanggungjawab masing-masing anggota keluarga. Bagi anggota keluarga yang telah bekerja, mereka dapat mengusahakan sendiri sarapannya entah dengan cara membeli di warung atau menikmati sarapan di tempat kerja. Untuk makan siang biasanya ibu selaku kepala keluarga menyediakan bekal, baik untuk anggota keluarga yang telah bekerja maupun bagi yang masih sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat biaya makan siang yang biasanya lebih besar dibanding biaya untuk membeli sarapan.

Berdasarkan pengakuan seluruh responden, kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini sangat memengaruhi daya beli rumah tangga yang berkorelasi langsung dengan pola konsumsi keluarga. Karena keterbatasan dana untuk membeli bahan pangan, para ibu harus jeli mencari alternatif pemenuhan kebutuhan keluarga. Bahan pangan pokok

### *Peran Perempuan Suku Minangkabau...*

seperti nasi memang masih dapat disediakan namun biasanya dengan kualitas yang sedikit lebih rendah dibanding kualitas bahan pokok yang bisa diperoleh di saat harga pangan stabil.

#### 3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan

Keseluruhan responden mengakses bahan pangan dengan cara tidak langsung atau dengan jalan membeli karena mereka tidak memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Jikalau ada, lahan yang tersedia tidak memadai digunakan untuk menanam tanaman pangan, hanya cukup untuk ditumbuhi beberapa tanaman dapur hidup atau apotek hidup. Maklumlah lahan di perkotaan memang tidak seluas lahan yang dimiliki di daerah asal. Namun ada sebagian responden yang pada saat-saat tertentu seperti pada masa panen mendapatkan kiriman bahan pangan dari sanak saudara di kampung walaupun jumlahnya tidak signifikan. Bahan pangan dalam bentuk beras, kelapa atau bumbu dapur biasanya cukup untuk menopang kebutuhan pangan keluarga untuk jangka satu minggu.

Alternatif lain yang ditempuh para kepala keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan alokasi belanja pangan yang terbatas adalah dengan membeli bahan pangan murah. Biasanya para ibu berbondong-bondong berbelanja ke pasar raya di sore hari karena harga bahan pangan seperti lauk, sayuran, dan sejumlah bumbu dapur dapat diperoleh dengan harga murah walaupun bahan pangan tersebut tidak lagi dalam kondisi seratus persen segar. Disamping itu dengan memanfaatkan kupon operasi pasar, sejumlah bahan pangan juga bisa diperoleh dengan harga relatif rendah dibanding harga pasaran umum, seperti beras, miyak goreng dan gula pasir. Sayangnya operasi pasar yang selama ini dilaksanakan kurang menyentuh sasaran karena kupon operasi pasar lebih banyak dimanfaatkan oleh pedagang dan anggota masyarakat golongan ekonomi menengah sehingga rumah tangga menengah ke bawah tidak memiliki akses.

#### 4. Kualitas/keamanan pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi gizi

Jikalau para perempuan kepala keluarga mampu mengusahakan nasi sebagai makanan pokok bagi keluarganya, maka mereka mengalami kesulitan ketika harus menyediakan

lauk pauk dan makanan bergizi lainnya bagi anggota keluarga. Hal ini tidak saja disebabkan karena keterbatasan penghasilan namun juga karena ketidakpahaman perempuan tentang apa itu makanan bergizi, bagaimana komposisinya, dan apa manfaatnya bagi tubuh. Bisa dikatakan dengan beban ganda yang dipikulnya –sebagai pencari nafkah utama sekaligus ibu rumah tangga –perempuan tidak lagi memiliki waktu dan tenaga untuk mengakses informasi gizi ataupun mengolah makanan bergizi bagi keluarga. Jadi makan dalam pengertian mereka disini tak lebih sebagai aktivitas rutin untuk mengganti energi yang telah terkuras oleh aktivitas harian.

Kasus yang sedikit berbeda dialami oleh perempuan yang menjadi kepala keluarga karena ditinggal mati oleh suami (janda). Rata-rata mereka memiliki penghasilan tetap yang didapat dari uang pensiun atau pesangon suami semasa dinas dahulu. Disamping itu, kebanyakan para janda ini juga memiliki pekerjaan sendiri, baik yang mereka jalani ketika suaminya masih hidup ataupun yang mulai bekerja setelah sang suami meninggal.

Dengan pendapatan minimal Rp.600.000 per bulannya, perempuan janda memiliki sedikit keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga. Ada kalanya keluarga juga memiliki kesempatan untuk menikmati makanan siap olah setidaknya satu kali sebulan, atau memiliki uang untuk membeli makanan jajanan.

Perempuan janda yang menikmati pensiun suami memang tidak terlalu bingung memikirkan penghasilan perbulannya sehingga masih memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan aktivitas sampingan bagi pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, seperti bercocok tanam atau memelihara hewan ternak di pekarangan rumah. Karena penghasilan yang lebih pasti setiap bulannya perempuan janda juga cenderung lebih kokoh ketahanan pangannya dibanding perempuan pencari nafkah utama keluarga. Perempuan janda biasanya memiliki persediaan makanan pokok setidaknya untuk jangka waktu satu minggu.

Sedangkan untuk perempuan yang menjadi korban poligami, sebagian dari mereka masih memperoleh separuh penghasilan suami. Walaupun harus dibagi dua dengan madunya, perempuan korban poligami setidaknya masih

memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Rata-rata perempuan yang menjadi korban poligami ini tidak diceraikan secara hukum oleh suaminya, sehingga mereka masih berhak atas nafkah dari sang suami. Namun ada juga suami yang kemudian tidak bertanggungjawab terhadap istri pertamanya. Selain status cerai yang tidak jelas, perempuan dan anak-anak mereka juga tidak diberi nafkah sehingga perempuan acapkali melakukan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari beberapa perbedaan antara perempuan pencari nafkah utama keluarga, perempuan janda dan perempuan korban poligami suku Minangkabau dalam menciptakan ketahanan pangan keluarga, penulis juga mengidentifikasi sejumlah kesamaan. Kesamaan tersebut diantaranya berkaitan dengan akses terhadap bahan pangan.

Keseluruhan responden yang penulis wawancarai menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses langsung terhadap bahan pangan. Dengan kata lain para perempuan kepala keluarga ini tidak memiliki lahan dan tidak memproduksi sendiri bahan pangannya. Akses mereka terhadap bahan pangan bersifat tidak langsung dengan cara membeli.

Hal yang kontradiktif penulis temukan disini. Dalam budaya Minangkabau yang menganut paham matrilineal (keturunan menurut garis ibu) sudah senyatanya jika harta pusaka tinggi turun kepada perempuan dan digunakan untuk kesejahteraan perempuan. Sebagai pemilik harta kaum perempuan berhak menggunakannya untuk kebutuhan diri dan anaknya. Namun dalam realitasnya banyak perempuan yang kemudian terpinggirkan hak ekonomi dan sosialnya karena dominasi mamak atau penghulu kaum.

Akibat nyata yang terlihat adalah perempuan utamanya perempuan kepala keluarga tidak dapat menikmati hak mereka. Mereka tidak diperkenankan mengolah tanah yang menjadi bagiannya dan juga tidak mendapat jatah apapun jika ada mamak yang berbuat curang dan menjual harta/waris.

Untuk kasus Kecamatan Padang Timur, para perempuan kepala keluarga umumnya jarang memiliki kesempatan untuk mengolah tanah pusaka. Jikapun ada kesempatan itu bisa dihitung dengan jari, karena apabila dipergilirkan maka mereka hanya mendapat kesempatan

satu kali tanam dalam kurun dua tahun. Hasil yang diperolehpun tidak setara dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan ketika masa tanam.

Jika tanah pusaka diolah oleh anggota kaum lainnya, perempuan-perempuan ini acapkali tidak mendapat bagian yang memadai. Andaikata hasil panen padi mencapai dua puluh kuintal, perempuan kepala keluarga maksimal hanya mendapat sepuluh kilogram beras. Padahal seharusnya perempuan-perempuan tersebut berikut anaknya memperoleh perhatian lebih dari anggota kaum.

Ketika perempuan hijrah ke kota, mereka dianggap memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dibanding kehidupan yang pernah dijalani di kampung halaman. Akibatnya perempuan semakin termarginalkan haknya dalam menikmati bagian dari harta/waris kaum. Terkadang para perempuan kepala keluarga ini dibebani lagi dengan permintaan bantuan yang datang dari saudara-saudara di kampung.

Jikalau ada mamak yang dengan adil mengelola harta/waris, perempuan kepala keluarga juga tidak serta merta mendapat bagian dari haknya, karena hasil perolehan harta tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan kaum, seperti babako, perhelatan, dan ritual adat lainnya. Terkadang jika dana untuk perhelatan atau ritual adat tidak mencukupi, para perempuan ini juga ikut dimintai kontribusinya dalam bentuk sumbangan dana.

Dari pemaparan di atas tampak bahwa keberadaan perempuan sebagai pewaris harta pusaka tidak memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Aturan normatif yang menyatakan bahwa mamak atau penghulu harus bertanggungjawab terhadap kemenakan dan bundo kanduang tidak sepenuhnya terealisasi.

#### ***Upaya-upaya yang ditempuh perempuan suku Minangkabau yang menjadi Kepala Keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga yang diasuhnya***

Perempuan kepala keluarga adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Tidak saja untuk menyediakan kondisi yang nyaman dalam rumah tangga tetapi juga untuk memperoleh bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga.



## *Peran Perempuan Suku Minangkabau...*

Mayoritas perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga dan perempuan korban poligami yang menjadi responden penelitian ini mengakui bahwa penghasilan yang diperoleh setiap bulan seringkali tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Setidaknya 70 hingga 90 % dari penghasilan tersebut terserap untuk membeli bahan pangan terutama bahan makanan pokok. Jadi bisa dikatakan tidak ada sisa penghasilan yang mampu mereka tabung.

Rendahnya penghasilan ditambah meningkatnya harga kebutuhan pangan semakin memperberat beban perempuan kepala keluarga. Alhasil dalam berbelanja bahan pangan faktor gizi bukan menjadi pertimbangan utama. Bahkan terkadang mereka harus mengurangi jumlah dan jenis bahan pangan yang dibeli karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Ada pula yang kemudian harus berhutang untuk membeli bahan makanan tertentu seperti beras atau minyak goreng.

Jika para responden ini memiliki sedikit pekarangan untuk ditanami, mereka sering memberdayakannya untuk menanam sayuran atau bumbu dapur. Cara ini dianggap ampuh untuk menghemat pengeluaran. Tapi sempitnya pekarangan sering tidak memungkinkan mereka untuk bisa bercocok tanam. Andaikata tersedia sedikit lahan untuk ditanami, niat untuk bercocok tanam seringkali terkendala kelelahan yang timbul karena beratnya beban mencari nafkah, sehingga sebagian mereka lebih memilih menggunakan sedikit waktu luang yang tersisa untuk beristirahat.

Bagi responden yang berstatus janda, utamanya janda yang memperoleh pensiun, kondisi ekonomi mereka bisa dikatakan relatif lebih baik dibanding perempuan pencari nafkah utama, perempuan korban poligami, ataupun perempuan janda non-pensiun. Namun keadaan ekonomi janda pensiun juga berbeda satu sama lain berdasarkan tingkat ketergantungan mereka terhadap pensiun yang diterima. Walaupun pensiun tersebut menjamin penghasilan bulanan yang stabil, tak sedikit dari janda pensiun yang mengeluhkan tidak seimbang besarnya pensiun yang diterima dengan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi rumit bisa juga timbul karena pengaruh adat dan kebiasaan. Rata-rata orang Minangkabau yang menyukai masakan pedas

dan bersantan menyebabkan perlunya pengeluaran ekstra untuk membeli bumbu dapur tersebut. Acara adat atau hari besar agama turut berkontribusi menambah besaran pengeluaran untuk membeli bahan pangan. Kebiasaan setempat yang menyenangkan ritual dan perhelatan berimplikasi pada jenis masakan yang harus disediakan oleh suatu keluarga saat hari besar berlangsung. Pandangan masyarakat setempat ada kalanya berkontribusi terhadap pola makan suatu keluarga. Terasa sungkan jika pada hari raya misalnya tidak ada sajian rendang atau lemag di sebuah rumah. Orang akan berasumsi bahwa keluarga bersangkutan pelit atau bahkan tidak mampu secara ekonomi. Tradisi yang sesungguhnya hanya berdasar prestise semata.

Para responden seringkali menempuh beragam cara untuk menghemat pengeluaran. Ada yang melakukannya melalui pengaturan pola makan. Artinya di rumah hanya akan disediakan bahan pangan untuk makan siang dan makan malam. Sedangkan untuk sarapan diserahkan pada masing-masing anggota keluarga. Bagi yang sudah memiliki penghasilan sendiri tentu saja dapat menikmati sarapan di luar rumah atau di tempat bekerja, namun bagi yang belum berpenghasilan adakalanya tidak bisa sarapan ketika berangkat ke sekolah. Uang jajan yang dimilikipun tidak memadai untuk membeli satu porsi sarapan pagi.

Pada waktu-waktu tertentu, seperti saat liburan atau jeda hari kerja para perempuan ini acap menyempatkan diri untuk menyediakan pangan tambahan bagi anggota keluarga. Dengan pertimbangan efisiensi, mereka mengolah bahan yang dimiliki untuk dijadikan makanan cemilan sebagai penambah asupan makanan bagi anak-anak. Bagi yang memiliki keterampilan kuliner biasanya juga dimanfaatkan untuk membuat makanan kecil yang kemudian dititipkan ke warung atau sekolah di sekitar tempat tinggal. Pendapatan dari penjualan kecil-kecilan ini memberikan kontribusi cukup besar bagi keluarga, dan biasanya digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.

Status sebagai kepala keluarga tidak serta merta membuat para responden ini menjadi berhak atau tidak berhak atas program bantuan pemerintah berkaitan dengan pengentasan

kemiskinan dan sejenisnya. Aspek-aspek lain seperti gender, usia, atau tingkat pendapatan lebih menentukan dalam hal ini walau terkadang penilaian subjektif juga berperan.

Ada kisah seorang janda dengan tanggungan lima orang anak dalam usia sekolah dan menyandarkan hidup pada usaha dagang gorengan dengan penghasilan sekitar Rp. 600.000,- per bulan, namun tidak pernah sekalipun memperoleh bantuan pemerintah, entah itu beras miskin (Raskin) atau bantuan langsung tunai (BLT). Tidak jelas baginya mengapa aparat RT/RW setempat tidak pernah mendaftarkan dan memasukkan keluarganya sebagai bagian dari orang-orang yang berhak memperoleh bantuan pemerintah. Nilai-nilai yang dianut juga tidak memungkinkan dirinya untuk meminta dan mengharap pemberian bantuan.

Sementara sisi sebaliknya dialami seorang perempuan korban poligami yang tidak lagi mempunyai tanggungan anak sekolah. Dengan bagian pensiun yang rutin diperoleh dari suami, ibu ini selalu menikmati setiap bantuan pemerintah sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.

Bentuk bantuan pemerintah lainnya juga menjadi idola kaum perempuan kepala keluarga. Operasi pasar atau penjualan kebutuhan pangan dengan harga di bawah harga pasaran seringkali menjadi incaran mereka. Berbagai upaya ditempuh agar bisa memperoleh kupon operasi pasar. Pembatasan kuota pembelian tidak menjadi halangan untuk mengikuti operasi pasar. Sedikit pengurangan harga dianggap sebagai hal yang signifikan bagi mereka. Sayangnya, operasi pasar ini seringkali tidak menjangkau bagian terbesar dari rumah tangga yang sebenarnya membutuhkan. Kecurangan dan kelalaian administratif membuat sebagian besar masyarakat yang membutuhkan tidak dapat menikmati kemudahan dari program pemerintah.

Secara umum ketika para perempuan kepala keluarga memiliki anak-anak yang telah bekerja, kesulitan finansial sedikit teratasi. Disamping karena anak bersangkutan tidak lagi menjadi tanggungan penuh orang tua juga dikarenakan anak-anak ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi keluarga.

Senada dengan penelitian terdahulu, sebagian besar janda menyebutkan anggota keluarga, khususnya anak-anak sebagai pemberi

bantuan utama. Sekalipun beberapa kasus menunjukkan ikatan keluarga termasuk hubungan orangtua-anak, tidak selalu menjamin diperolehnya bantuan yang memadai. Meskipun anak-anak tersebut produktif secara ekonomis, banyak pertimbangan lain yang kemudian menyebabkan mereka tidak bisa memberikan bantuan berarti kepada keluarganya. Fakta selama ini menunjukkan bahwa bantuan terbesar bagi perempuan kepala keluarga berasal dari anak perempuan, utamanya anak perempuan yang memang mandiri secara finansial.

### **Simpulan**

Dari beberapa uraian dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Perempuan kepala keluarga acapkali lebih berdaya dibanding perempuan lain pada umumnya. Teori dan fakta memperlihatkan bahwa mereka seringkali diasosiasikan dengan 'kekuatan' dan ketangguhan. Berjuang seorang diri tidak serta merta menjadikan perempuan difabel dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Mereka justru lebih kreatif menciptakan cara agar kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi namun pengeluaran juga tidak menggelembung.
2. Perempuan kepala keluarga terbukti lebih cepat menyesuaikan diri dan lebih baik dalam proses membangun kemandirian. Uang yang masuk ke rumah tangga melalui perempuan lebih bermanfaat bagi keluarga secara keseluruhan. Ketika seorang perempuan memperoleh penghasilan, impian keberhasilan selalu terpusat di sekitar anak-anaknya. Bagian terbesar dari penghasilan yang diperoleh seringkali digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan pendidikan putera-puterinya.

Upaya-upaya pemberdayaan perempuan kepala keluarga sebaiknya tidak hanya ditempuh melalui program-program formal pemerintah yang seringkali hanya menciptakan ketergantungan bagi penerimanya. Cara yang lebih efektif dapat ditempuh melalui pendekatan nyata yang hasilnya dapat dinikmati bersama dan langsung oleh perempuan beserta keluarganya. Cara sederhana dapat dilakukan oleh kelompok PKK, para penyuluh misalnya dapat memberi pelatihan tentang alternatif bahan

## *Peran Perempuan Suku Minangkabau...*

pangan bergizi bagi keluarga. Artinya keluarga nantinya tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pangan seperti nasi. Sehingga jika harga beras melonjak atau menjadi langka, perempuan kepala keluarga tetap dapat menghadirkan bahan olahan bergizi lainnya bagi keluarga. Harga yang relatif lebih murah dan kandungan gizi setara dengan bahan pangan yang disubstitusi memungkinkan penghematan pengeluaran untuk bahan pangan dialokasikan bagi pemenuhan kebutuhan lainnya.

### **Daftar Rujukan**

- . 2008. *Ketahanan Pangan Keluarga*. (<http://damandiri.or.id/file/wahidiptijauan.pdf> diakses 4 Februari 2008)
- Ancha. 2007. *Analisis: Perempuan sebagai Kepala Keluarga*. (<http://www.kab-merauke.go.id> diakses 4 Februari 2008)
- Dewi, Sinta R. 2006. "Gender Mainstreaming: Feminisme, Gender dan Transformasi Institusi", *Jurnal Perempuan* 50, 7-16.
- Esterlianawati. 2008. *Kerentanan Perempuan dalam Ketahanan Pangan : Pentingnya Variabel Gender*. (<http://esterlianawati.wordpress.com> diakses 4 Februari 2008).
- Hatta, Meautia. 2006. "Perempuan harus mendapatkan kesetaraan, keadilan, juga perlindungan". *Jurnal Perempuan* 50, 106-114.
- Marianti, Ruly. 2002. *Surviving Spouses Support for Widows in Malang East Java: Academish Proefschrift*. Amsterdam: Ipskamp Partner.
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2008. *Pekka Menggugat Hak, Martabat, dan Keadilan*. (<http://kompas-cetak/> diakses 4 Februari 2008)
- PPK-LIPI. 2004. "Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Demografi Rumah Tangga". *Seri Penelitian PPK-LIPI* No. 56/2004. Jakarta: Puslit kependudukan \_ LIPI.
- Seabrook, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Thaib, Puti Reno Raudha. 2008. Peran Perempuan Minangkabau dalam Membangun Keluarga yang Islami. (<http://minangkabaunews.blogspot.com/diakses> 30 Mei 2008 pukul 14.14 WIB)
- Soraya, Noni. 2007. *Perempuan sebagai Lumbung Pangan Keluarga*.
- Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.